

**PENGARUH TENAGA KEJA, TINGKAT PENDIDIKAN DAN  
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata 1  
pada Jurusan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:**

**SIGIT EDI SAPUTRA**

**B300142040**

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH TENAGA KEJA, TINGKAT PENDIDIKAN DAN  
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**SIGIT EDI SAPUTRA**

**B300142040**

**Telah diperiksa dan di disetujui oleh:**

**Dosen Pembimbing**



**(Ir. Maulidyah Indira Hasmarini., MS)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH TENAGA KEJA, TINGKAT PENDIDIKAN DAN  
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015**

Oleh:

**SIGIT EDI SAPUTRA**  
**B300142040**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Sabtu, 13 Oktober 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dewan Penguji:**

1. **Ir. Maulidyah Indira Hasmarini., MS**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Muhammad Arif.,SE.,MEc.Dev**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. Didit Purnomo.,MSL**  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

**Mengetahui,**



()  
(Dr. Syamsudin, M.M.)

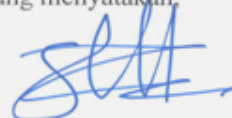
## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Oktober 2018

Yang menyatakan,



Sigit Edi Saputra

B300142040

# **PENGARUH TENAGA KEJA, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015**

## **Abstrak**

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Tenaga kerja, Tingkat pendidikan, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Di Jawa tengah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh Tenaga kerja (TK), Tingkat pendidikan (TP), Pengeluaran pemerintah (PP) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah. Penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Data Panel. Berdasarkan hasil uji Regresi Data Panel menunjukkan bahwa variabel Tenaga Kerja Tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, variabel Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

**Kata Kunci :** Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga kerja, Tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah.

## **Abstract**

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Beban Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah. This research was conducted with the aim of analyzing the influence of Labor (TK), Education level (TP), Government Expenditure (PP) on Economic Growth in Central Java. This study was sourced from the Central Statistics Agency (BPS). The analysis method used is Panel Data Regression Analysis. Based on the results of the Panel Data Regression test shows that the Labor variable does not have a negative and insignificant effect on Economic Growth, the Education Level variable has a positive and significant effect on Economic Growth, the variables of government expenditure have a positive and significant effect on Economic Growth

**Keywords:** Economic Growth, Labor, education level, government expenditure.

## **1. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode keperiode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Menurut Sukirno (2004)

dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi di daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu : modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 1994:456). Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai “motor”, sedangkan pemerintah provinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Pembangunan di provinsi Jawa Tengah yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun disisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumberdaya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat propinsi maupun di kabupaten/kota.

Menurut Adam Smith, dalam buku "*The Wealth of Nations*", pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan PDB itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan sumber daya alam, jumlah penduduk dan

persediaan barang-barang modal. Pertumbuhan ekonomi memang dipengaruhi dalam empat faktor tersebut, tetapi juga memiliki variabel pendukung yang bisa meningkatkan dan membantu proses pertumbuhan ekonomi seperti tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah daerah, dan tenaga kerja.

Pengeluaran pemerintah menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang pemerintah (barang yang disediakan oleh pemerintah) dan menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut atas tersedianya barang pemerintah. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang pemerintah menentukan jumlah barang pemerintah yang akan disediakan melalui anggaran belanja.

Tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi *output* suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000), pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi *output* di suatu daerah.

Dari latar belakang diatas, maka studi ini tertarik untuk mengkaji sejauh mana pengaruh tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

## **2. METODE**

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis ekonometrika dalam bentuk analisis data panel. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang biasa telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro,2011). Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah serta literatur-literaturlain yang terkait dengan penelitian. Metode pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif. Untuk menganalisis data sebagai pemecah masalah dalam penelitian ini, dihitung menggunakan data panel atau *pooled* data yang merupakan kombinasi dari data yang disusun berdasarkan urutan waktu.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marganda Simamora, Sirajuzilam (2008) yang menyimpulkan bahwa kepadatan penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional disebabkan antara lain rendahnya kualitas human capital angkatan kerja yang melakukan aktivitas ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Neni Pancawati (2000) yang menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output.

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pendidikan memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006). Penduduk yang berpendidikan diasumsikan mempunyai keterampilan dan pengetahuan tinggi, sehingga dapat menyerap teknologi modern dan meningkatkan kapasitas produksi.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka



semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga selain bisa memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji/upah yang sesuai, tingginya tingkat pendidikan juga dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat.

Sejalan dengan pendapat Sukirno (2011) bahwa pendidikan, latihan dan pengalaman kerja akan meningkatkan keterampilan penduduk. Hal ini kemudian akan menyebabkan produktivitas bertambah yang selanjutnya produksi pun akan bertambah. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu Negara (daerah) karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu Negara. Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marganda Simamora, Sirajuzilam (2008) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Sejalan dengan pendapat (Wibisono, 2003) bahwa pertumbuhan PDRB, sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah yang diukur dari pengeluaran rutin dan pembangunan mempunyai peranan dan fungsi cukup besar mendukung sasaran

pembangunan dalam menunjang kegiatan pemerintah serta peningkatan jangkauan dan misi pelayanan yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi. Layaknya pengeluaran masyarakat maka pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat melalui multiplie- effect dan selanjutnya akan meningkatkan produksi atau penawaran agregat sehingga PDRB akan meningkat.

Diperkuat dengan pendapat Sukirno (2011) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBI daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **4. PENUTUP**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyimpangan asumsi klasik menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas, tidak ada masalah heteroskedastisitas, dan tidak ada masalah autokorelasi, maka dapat disimpulkan model bersifat *BLUE (Best Linier Unbiased Estimator)*.

Hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional adalah tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah, sedangkan variabel yang tidak berpengaruh adalah tenaga kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Rendahnya kualitas sumber daya angkatan kerja yang melakukan aktivitas ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Pendidikan akan meningkatkan keterampilan penduduk dan akan menyebabkan

produktivitas bertambah sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Wiisono, 2003).

Adapun saran-saran yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah adalah: Provinsi Jawa Tengah sebaiknya berupaya meningkatkan kualitas angkatan kerja dengan memperbanyak fasilitas pendidikan latihan di BLK, atau membeikan pendidikan kewirausahaan melalui jalur non formal. Pelatihan dan pemberian bantuan wirausaha perlu dimonitoring agar program berjalan sesuai harapan.

Pendidikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM harus terus diupayakan. Pemberian program beasiswa pendidikan memang telah gencar dilakukan oleh Pemerintah. Namun, beberapa masih kurang tepat sasaran dan mengalami kendala. Evaluasi dan monitoring tetap harus dilakukan untuk memastikan program tersebut tepat sasaran dan tidak tersendat.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mengalokasikan belanja daerah secara proporsional antara belanja rutin yang konsumtif dengan belanja pembangunan yang lebih memihak kepentingan publik sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alisjahbana A.S, A.A. Yusuf, Chotib, M. Yasin, T.B. Suprobo. 2003. *“Understanding the Determinants and Consequences of Income Inequality in Indonesia”*.
- Barro. 2001. *Economic Growth in a Cross Section of Country*. Working Paper. National Bureau Of Economic Research Working Paper No. 7038.
- Boediono. 1982. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFU-UGM.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Gama, Ayu Savitri. *Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Propinsi Bali*. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT, Volume 2 Nomor 1.

- Gujarati, Damodar. 1998. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Herijanto, Prijono Tjipto. 2001. *Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan*. Majalah Perencanaan Pembangunan, Edisi 23.
- Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono, 2011. *Manajemen Perbankan*: Yogyakarta: BPFE UGM
- Maharani, Dewi. 2016. *Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Utara*, Jurnal Intiqad Vol. 8 No. 2 Desember 2016:
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*. Terjemahan .Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Marganda, Simamora, dan Sirajuzilam. 2008. *Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatra Utara*, Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah Wahana Hijau, Vol.4, No.2, Desember 2008
- Nazara, Suahasil. 1994. *Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia. Suatu Aplikasi Fungsi Produksi Agregrat Indonesia (1985-1991)*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Indonesia, Vol. II No. 3, Des 1991
- Nopirin. 1999. *Ekonomi Moneter*. Buku 2. Edisi I. Yogyakarta : BPFE UGM